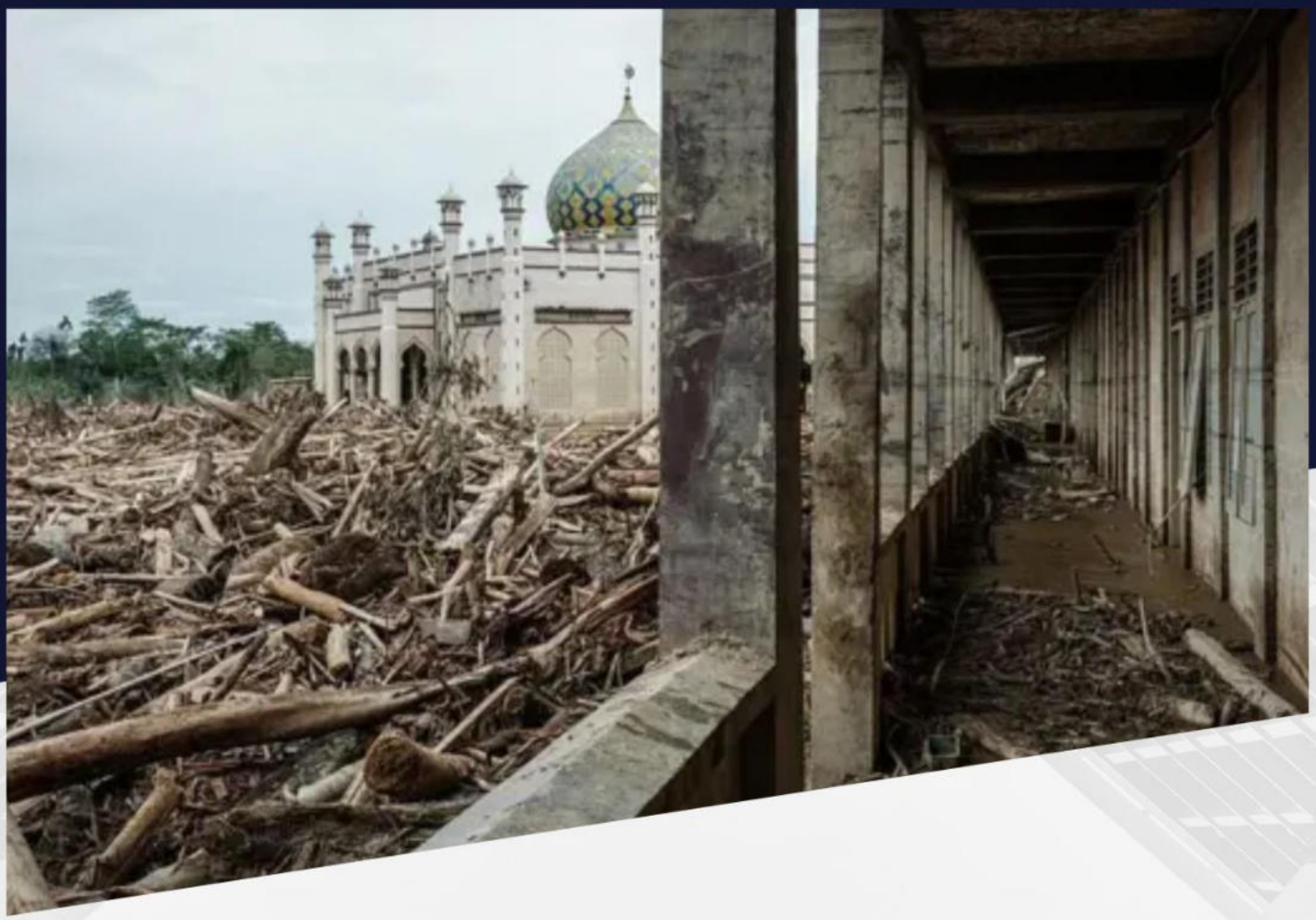
RAPID ANALYSIS



ESENSI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA ACEH, SUMATERA UTARA, DAN SUMATERA BARAT

TRIANGULASI RESEARCH INDONESIA

RAPID ANALYSIS

ESENSI *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA ACEH, SUMATERA UTARA, DAN SUMATERA BARAT

Penyusun / Peneliti	Tim Triangulasi Research Indonesia
Lembaga Kajian	Triangulasi Research Indonesia
Tanggal Publikasi	6 Februari 2026

CATATAN PERISTIWA

Pulau Sumatera, khususnya bagian utara dan barat, adalah etalase keindahan sekaligus kerawanan geologis Indonesia. Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya disatukan oleh garis pantai Samudra Hindia yang memukau, tetapi juga oleh "tulang punggung" pegunungan Bukit Barisan dan Patahan Semangko yang aktif.

Selama beberapa dekade, narasi bencana di wilayah ini didominasi oleh trauma Tsunami 2004 dan Gempa Padang 2009 (Smith, 2018; Dewi, Rauzi, & Irwansyah, 2024). Namun, penghujung tahun 2025 membuka mata kita pada ancaman yang lebih senyap namun mematikan: krisis iklim yang memuncak. November 2025 bukan lagi sekadar musim penghujan biasa (Yulizar & Asdak, 2025); ia menjadi manifestasi nyata dari anomali cuaca yang telah lama diperingatkan oleh para ilmuwan.

Pada minggu ketiga November 2025, sebuah fenomena atmosfer ekstrem—kombinasi dari La Niña intensitas tinggi dan Dipole Mode negatif di Samudra Hindia—menciptakan "koridor badai" yang menetap tepat di atas langit Sumatera bagian utara hingga Tengah (Nugroho, 2025). Di Aceh, curah hujan yang turun selama tiga hari setara dengan curah hujan tiga bulan, menenggelamkan lumbung padi di Aceh Utara dan Pidie, serta memicu banjir bandang di kawasan hulu yang telah gundul akibat deforestasi. Di Sumatera Utara, tanah vulkanik yang labil di sekitar Danau Toba dan perbukitan Sibolangit tidak lagi mampu menahan saturasi air. Longsor masif memutus jalur logistik vital Lintas Sumatera, mengisolasi ribuan warga di perbatasan kabupaten. Di Sumatera Barat, trauma Galodo (banjir lahar dingin dan bandang) kembali terulang. Lereng Marapi dan Singgalang memuntahkan material batuan dan lumpur, menyapu pemukiman di lembah-lembah sempit Tanah Datar dan Agam dengan kecepatan yang tak terantisipasi.



Kayu gelondongan yang ditemukan pascabencana banjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh (Sumber: ANTARA)

Bencana serentak di tiga provinsi ini melumpuhkan denyut nadi ekonomi dan sosial di ujung barat Indonesia (Komdigi, 2025). Infrastruktur kritis seperti jembatan, jalan nasional, dan jaringan listrik hancur total. Namun, di balik angka kerugian materiil yang mencapai triliunan rupiah, terdapat kisah manusia yang jauh lebih memilukan. Ribuan keluarga kehilangan tempat bernaung, petani kehilangan harapan panen, dan trauma psikologis kembali menghantui generasi yang pernah berjanji untuk bangkit dari bencana sebelumnya.

Kejadian di penghujung November 2025 ini menelanjangi kegagalan kita dalam tata ruang dan mitigasi bencana. Ia menjadi bukti bahwa alam tidak lagi bisa diprediksi menggunakan kalender musim konvensional, dan bahwa kerusakan ekologis di hulu Bukit Barisan memiliki konsekuensi fatal bagi jutaan nyawa di hilir.

Menarik ke belakang, sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025, narasi kebencanaan di Indonesia sebenarnya telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan. Pemerintah, melalui sinergi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan pemerintah daerah, telah meluncurkan berbagai langkah antisipatif yang agresif. Peta risiko bencana dimutakhirkan, Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) disiagakan lebih awal, dan simulasi kesiapsiagaan menghadapi Megathrust serta bencana hidrometeorologi rutin digelar di pesisir barat Sumatera (ANTARA, 2024).

Indonesia tampaknya lebih siap dari sebelumnya. Dokumen perencanaan pembangunan menekankan pada "Infrastruktur Tahan Bencana", dan peringatan dini cuaca ekstrem disebarkan hingga ke gawai warga desa. Di atas kertas, "perisai" pelindung masyarakat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah ditegakkan sebelum musim hujan tiba.

Namun, penghujung November 2025 datang bukan sekadar sebagai ujian musim. Alam membuktikan bahwa variabel perubahan iklim bergerak jauh lebih cepat daripada birokrasi mitigasi. Ketika konvergensi badai tropis menghantam Pesisir Barat dan Pegunungan Bukit Barisan secara serentak, sistem antisipasi yang dibangun menghadapi tantangan yang tak terduga. Di Aceh, meskipun sistem drainase kota telah direvitalisasi, volume air hujan yang ekstrem melampaui kapasitas tampung (*overcapacity*) hingga 300% (Ramadhanty, 2025), membuktikan bahwa standar infrastruktur lama sudah usang (*obsolete*) melawan iklim baru. Di Sumatera Utara, langkah antisipasi berupa pemetaan zona merah longsor ternyata gagal diimbangi dengan penegakan hukum tata ruang (Republika, 2026). Hutan penyangga yang seharusnya steril tetap beralih fungsi, menyebabkan longsor terjadi justru di area yang tidak terdeteksi radar mitigasi sebelumnya. Di Sumatera Barat, sabo dam dan kantong lahar yang disiapkan pemerintah pasca-bencana sebelumnya memang berfungsi, namun intensitas galodo (banjir bandang) kali ini membawa material sedimen baru dari hulu yang rapuh, menjebol pertahanan teknis yang telah dibangun dengan biaya miliaran rupiah (ANTARA, 2026).

Banjir bandang yang menyapu daratan Aceh, longsor masif yang membelah perbukitan Sumatera Utara, dan amukan galodo yang menimbun pemukiman di Sumatera Barat menciptakan luka kolektif yang mendalam. Ketika masa tanggap darurat berakhir dan sorot kamera media mulai meredup, sisa-sisa kehancuran meninggalkan sebuah pertanyaan eksistensial bagi jutaan jiwa yang selamat: “Bagaimana kami akan melanjutkan hidup besok?”.

Bencana bukan hanya tentang robohnya bangunan fisik, melainkan runtuhnya tatanan sosial, ekonomi, dan psikologis. Di sinilah peran negara melalui langkah Rehabilitasi dan Rekonstruksi menjadi mutlak dan krusial. Rehabilitasi bukan sekadar memperbaiki apa yang rusak, melainkan upaya

pemulihan pelayanan publik hingga level mikro—memastikan sekolah kembali dibuka, trauma korban mulai terobati, dan denyut nadi pasar kembali berdetak. Sementara itu, Rekonstruksi adalah janji pemerintah untuk membangun kembali infrastruktur yang lebih tangguh (*build back better*). Tanpa langkah Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terukur, terencana, dan cepat, sebuah wilayah pascabencana berisiko terjebak dalam kemiskinan struktural yang permanen dan instabilitas sosial.



Wilayah yang terdampak banjir bandang di Aceh Tamiang (Sumber: Liputan6.com)

Hingga akhir Januari 2026, data menunjukkan skala bencana yang sangat luas di tiga provinsi tersebut. Dalam konteks korban Jiwa dan pengungsian, tercatat sebanyak 1.201 orang meninggal dunia dan 142 orang masih dinyatakan hilang. Meskipun jumlah pengungsi sempat mencapai puncaknya di angka 2,1 juta jiwa pada awal Desember 2025, angka tersebut telah menurun menjadi sekitar 113,9 ribu jiwa pada 25 Januari 2026. Kemudian, terkait kerusakan rumah, total rumah yang mengalami kerusakan mencapai 175.050 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 53.412 unit masuk kategori rusak berat, 45.085 unit rusak sedang, dan 76.553 unit rusak ringan. Selain itu, fasilitas pendidikan berupa 4.546 bangunan sekolah terdampak, sebanyak 2.164 ruas jalan dan 810 jembatan mengalami kerusakan, dan fasilitas lainnya mencakup 215 fasilitas kesehatan, 1.300 fasilitas umum, serta 420 tempat ibadah yang rusak. Bencana ini berdampak pada 52 kabupaten/kota, 522 kecamatan, dan 5.443 desa/kelurahan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan perhitungan awal pada Desember 2025, total kerugian dan kerusakan diperkirakan mencapai lebih dari Rp17,9 triliun.

Peristiwa di ketiga provinsi ini menjadi studi kasus yang sangat penting bagi kebijakan nasional karena beberapa hal. Pertama, interkonektivitas ekonomi. Sumatera adalah gerbang logistik nasional (Irewati, 2020). Kegagalan pemerintah melakukan rekonstruksi cepat pada jalur lintas Sumatera akan melumpuhkan distribusi pangan dan energi yang berdampak pada inflasi nasional. Kedua, kompleksitas sosial. Membangun kembali di Aceh yang memiliki sejarah konflik, di Sumatera Utara yang heterogen, dan di Sumatera Barat yang kental dengan adat, menuntut pendekatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga sosiologis (Farni, Zin, & Alzahri, 2019;

Herdiyanti, Suyanto, & Mas'udah, 2025; Bakar, 2025). Ketiga, pertaruhan kepercayaan publik. Efektivitas pemerintah dalam mengelola dana rekonstruksi dan kecepatan memindahkan warga dari zona merah adalah parameter utama kepercayaan rakyat terhadap negara di tengah ancaman krisis iklim global (Lamb & Vale, 2024; Bigger & Millington, 2020).



Jembatan sementara dari kayu pasca bencana Sumatera (Sumber: Okezone)

Dalam skala nasional, terletak di lintasan *Ring of Fire* dan berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indonesia secara kodrati adalah negeri yang akrab dengan bencana (Hinga, 2015; De Priester, 2016). Dari gempa bumi, tsunami, hingga bencana hidrometeorologi yang kian ekstrem akibat krisis iklim, ancaman bencana bukan lagi pertanyaan "apakah", melainkan "kapan". Namun, tantangan terbesar bangsa ini sering kali bukan terletak pada saat bencana menghantam, melainkan pada fase panjang dan melelahkan setelahnya: Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Sejarah panjang kebencanaan di Indonesia mengajarkan bahwa pendekatan *top-down* (dari atas ke bawah) dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi sering kali menemui jalan buntu. Ego sektoral antar-kementerian, tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah, serta pengabaian terhadap aspirasi komunitas lokal kerap menjadi penghambat utama. Ketika fase tanggap darurat berakhir, tantangan yang muncul jauh lebih kompleks. Kerusakan infrastruktur, hilangnya mata pencaharian, dan trauma psikis jutaan warga menuntut jawaban yang tidak mungkin hanya dipikul oleh satu instansi atau satu level pemerintahan saja. Inilah yang melatarbelakangi perlunya paradigma baru: Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif (*Collaborative Governance*) dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif (*Collaborative Governance*) dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana memberikan sinyal bahwa pendekatan *top-down* yang bersifat komando terbukti tidak lagi memadai untuk menangani kompleksitas pemulihan pascabencana yang mencakup dimensi fisik, ekonomi, sosial, hingga psikologis (Dai & Azhar, 2024; Kapucu, 2013). Kehancuran

infrastruktur mungkin bisa dihitung secara teknis, namun memulihkan kembali denyut kehidupan masyarakat memerlukan pendekatan yang lebih luwes dan inklusif.

Terdapat hipotesis yang perlu dibuktikan bahwa keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi di Indonesia sangat bergantung pada Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif. Kolaborasi dalam konteks ini bukan sekadar koordinasi di atas kertas, melainkan sebuah model pengelolaan yang melibatkan berbagai aktor secara setara dan terintegrasi. Secara vertikal, sinkronisasi yang presisi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat dibutuhkan. Secara horizontal, sinergi lintas kementerian menjadi keharuan untuk menghindari mekanisme yang sering kali bekerja dalam silo-silo yang terpisah. Secara diagonal, pelibatan aktif sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, hingga komunitas lokal dan tokoh adat sebagai pemilik kepentingan utama di daerah bencana menjadi sesuatu yang mutlak perlu dilakukan. Tanpa kolaborasi, proses relokasi warga sering kali menemui jalan buntu karena masalah lahan, bantuan stimulan rumah salah sasaran, dan infrastruktur yang dibangun justru mengabaikan kearifan lokal (*local wisdom*), sehingga menciptakan kerentanan baru di masa depan.

Sebagai refleksi dari pengalaman internasional, ketika bencana alam telah menjadi interuptor besar bagi kemajuan peradaban, di sinilah dunia menyadari sebuah kebenaran pahit: pemerintah tunggal, sekuat apa pun, tidak akan pernah cukup untuk memulihkan keadaan sendirian. Tradisi lama manajemen bencana seringkali terjebak dalam pendekatan "komando dan kendali" yang kaku. Di banyak negara, pemulihan sering terlambat bukan karena kurangnya dana, melainkan karena "penyakit" birokrasi yang disebut silo sectoral (National Research Council, 2011). Institusi infrastruktur bekerja tanpa bicara dengan institusi sosial; bantuan internasional datang tanpa memahami konteks lokal. Akibatnya, rumah dibangun tanpa penghuni, dan jembatan didirikan tanpa akses ekonomi.

Tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) hadir sebagai antitesis dari kegagalan tersebut. Ia adalah sebuah seni memimpin di mana pemerintah bertindak bukan sebagai penguasa tunggal, melainkan sebagai orkestrator. Dalam model ini, batas-batas antara negara, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi cair demi satu tujuan: resiliensi. Dalam konteks ini, dunia telah memberikan kita laboratorium pembelajaran yang luas. Jepang menunjukkan bagaimana kolaborasi antara teknologi mutakhir dan kearifan lokal memungkinkan pemulihan pasca-2011 yang luar biasa cepat (Sokolowski & Shimpo, 2025). Selandia Baru, melalui pemulihan pasca-Gempa Christchurch, mengajarkan pentingnya memberikan kursi bagi masyarakat lokal dalam meja pengambilan keputusan rekonstruksi (Dickinson, 2021). Indonesia, dengan sejarah panjangnya dari Tsunami 2004 hingga bencana November 2025, membuktikan bahwa keterlibatan lembaga adat dan komunitas lokal adalah kunci agar bangunan yang didirikan kembali memiliki "jiwa" dan diterima oleh warganya (Zainudin dkk., 2026).

Esensi dari kolaborasi adalah memastikan prinsip *Build Back Better* bukan sekadar jargon. Tanpa kolaborasi, rehabilitasi hanyalah aktivitas menambal luka. Namun dengan kolaborasi, rekonstruksi menjadi momentum untuk melompat lebih tinggi—membangun kota yang lebih cerdas, masyarakat yang lebih tangguh, dan sistem yang lebih adil.

Referensi

ANTARA. (2024). Kabasarnas: Simulasi latihan gabungan megathrust asah kewaspadaan. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/4434573/kabasarnas-simulasi-latihan-gabungan-megathrust-asah-kewaspadaan%C2%A0

ANTARA. (2026). Tanah Datar kembali usulkan Pembangunan sabo dam rusak akibat galodo. Diakses dari https://sumbar.antaranews.com/berita/740978/tanah-datar-kembali-usulkan-pembangunan-sabo-dam-rusak-akibat-galodo

Bakar, A. Y. A. (2025). Human–Nature Imbalance in Sumatera Ecological Disasters: Mubādalah as a Framework for a Just and Sustainable Ecological Model. *Journal of Islamic Mubādalah*, 114-134.

Bigger, P., & Millington, N. (2020). Getting soaked? Climate crisis, adaptation finance, and racialized austerity. *Environment and Planning E: Nature and Space*, *3*(3), 601-623.

Dai, J., & Azhar, A. (2024). Collaborative governance in disaster management and sustainable development. *Public Administration and Development*, *44*(4), 358-380.

De Priester, L. (2016). An approach to the profile of disaster risk of Indonesia. *Emergency and Disaster Reports, 3*(2), 5-66.

Dewi, C., Rauzi, E. N., & Irwansyah, M. (2024). Beautiful or Mournful? The Contested Meanings of the Tsunami Museum in the Post-disaster Landscape of Banda Aceh, Indonesia. In *Global Iconoclasm: Contesting "Official" Mnemonic Landscapes* (pp. 39-62). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Dickinson, S. (2021). Alternative narrations and imaginations of disaster recovery: A case study of relocatees after the Christchurch, New Zealand, earthquakes. *Social & Cultural Geography*, *22*(2), 273-293.

Farni, I., Zin, R. M., & Alzahri. (2019, September). Community base development at the implementation of rehabilitation and reconstruction project after earthquake in West Sumatera. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*(Vol. 620, No. 1, p. 012049). IOP Publishing.

Herdiyanti, H., Suyanto, B., & Mas' udah, S. (2025). Social capital and ecological transformation in post-mining land restoration in Indonesia. *Ambio*, 1-17.

Hinga, B. D. R. (2015). *Ring of fire: an encyclopedia of the Pacific Rim's earthquakes, tsunamis, and volcanoes*. Bloomsbury Publishing USA.

Irewati, A. (2020). The Challenges of Constructing the Connectivity between Indonesia and Malaysia in the Malacca Strait. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, *10*(1), 1-15.

Kapucu, N. (2013). Collaborative governance and disaster recovery: The National Disaster Recovery Framework (NDRF) in the US. In *Disaster recovery: Used or misused development opportunity* (pp. 41-59). Tokyo: Springer Japan.

Komdigi. (2025). Prabowo Fokus Pulihkan 3 Provinsi Terdampak Bencana, Kerahkan Seluruh Kekuatan. Diakses dari https://www.komdigi.go.id/berita/artikel-gpr/detail/prabowo-fokus-pulihkan-3-provinsi-terdampak-bencana-kerahkan-seluruh-kekuatan

Lamb, Z. B., & Vale, L. J. (2024). *The Equitably Resilient City: Solidarities and Struggles in the Face of Climate Crisis*. MIT Press.

National Research Council. (2011). *Building community disaster resilience through private-public collaboration*. National Academies Press.

Nugroho, A. (2025). Bencana Banjir Bandang Sumatera, Pakar UGM Sebut Akibat Kerusakan Ekosistem Hutan di Hulu DAS. Diakses dari https://ugm.ac.id/id/berita/bencana-banjir-bandang-sumatra-pakar-ugm-sebut-akibat-kerusakan-ekosistem-hutan-di-hulu-das/

Ramadhanty, N. (2025). Menteri LH Paparkan 9,79 M Kubik Air Turun dalam 2 Hari di Aceh. Diakses dari https://tirto.id/menteri-lh-paparkan-979-m-kubik-air-turun-dalam-2-hari-di-aceh-hm65

Republika. (2026). Pakar: Gugatan Negara atas Kerusakan Lingkungan Sumut Langkah Monumental. Diakses dari https://esgnow.republika.co.id/berita/t8yagd423/pakar-gugatan-negara-atas-kerusakan-lingkungan-sumut-langkah-monumental

Sokołowski, M. M., & Shimpo, F. (Eds.). (2025). *Smart cities and Japan's energy transition: Past, present, and future*. Taylor & Francis.

Yulizar, Y., & Asdak, C. (2025). The joint variation of temperature and precipitation across Indonesia: A seasonal and regional analysis. *Theoretical and Applied Climatology*, *156*(11), 1-15.

Zainudin, M., Dewi, R., Hadiana, D., Asih, T. N., Sylvia, N., & Hanun, F. (2026). A Systematic Review of Tsunami Disaster Mitigation Based on Tsunami Tendenko and Smong: Comparative Insights from Japan and Indonesia for Educational Practices. *IDRiM Journal*, *16*(1), 1-34.